

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI KAMPUNG DUKWIA ARSO VIII DISTRIK ARSO BARAT KABUPATEN KEEROM

Syamsudin Usman¹, Fitri Ayu Setyaningrum²

¹ Program Studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik USTJ
E-mail: syamusman01@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses rutin yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan daerah untuk menyusun program, kegiatan sumber pembiayaan yang nantinya akan dilaksanakan setiap tahunnya. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kampung Dukwia Arso VIII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data triangulasi dimana data dikumpulkan, direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Sumber informan adalah mereka yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yaitu stakeholder dan masyarakat di kampung Dukwia, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif masih belum dilaksanakan secara maksimal diakibatkan karena sosialisasi masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pemahaman dan tanggungjawab masyarakat terkait perencanaan pembangunan juga masih kurang. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan ada kesadaran bersama (stakeholder dan masyarakat) di Kampung Dukwia bahwa perencanaan pembangunan di Kampung Dukwia merupakan tanggungjawab bersama sehingga perlu dilakukan metode/ cara yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

Kata kunci; Perencanaan Pembangunan, Kampung Dukwia, Musrenbang, Partisipasi

ABSTRACT

Regional development planning is a routine process carried out by a regional government to develop programs, activities for financing sources which will be carried out annually. This study tries to describe how Community Participation in the Implementation of the Development Plan Deliberation (Musrenbang) in Dukwia Arso VIII Village, Arso Barat District, Keerom Regency. This type of research is descriptive qualitative by using triangulated data analysis where data is collected, reduced, presented and drawn conclusions. Sources of informants are those who are involved in the participatory development planning process, namely stakeholders and the community in Dukwia Village, Arso Barat District, Keerom Regency. The results of the study indicate that the development planning process with a participatory approach has not been implemented optimally due to socialization that has not been carried out optimally so that community understanding and responsibilities regarding development planning are also still lacking. The suggestion from this research is that it is hoped that there will be mutual awareness (stakeholders and the community) in Dukwia Village that development planning in Dukwia Village is a shared responsibility so that a more massive method / method is needed to increase public awareness in development participation in Dukwia Village, Arso Barat District, Keerom Regency .

Key words; Development Planning, Dukwia Village, Musrenbang, Participation

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan kata lainnya dan Kepala Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah tertentu. Sejak berlakunya UU No. 32./2014 dan UU 33/2014, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 yang merupakan penguat atau penjelasan yang lebih dari Undang-undang No 23 Tahun 2014 dimana Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan Untuk meningkat kan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa juga menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia yang menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih baik setiap harinya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Kondisi tersebut dapat menggambarkan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sebuah Kampung.

Strategi pembangunan perkampungan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan Kampung yang ideal. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui berbagai upaya. Berkaitan dengan upaya pembangunan Kampung, partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan Kampung sebenarnya ditujukan untuk memajukan Kampung itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan Kampung dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.

Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, terkait dengan hal tersebut strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan terutama di Kampung maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa Kampung mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perkampungan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan Kampung akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan cara musyawarah, masyarakat dapat menentukan suatu program pembangunan secara bersama dengan mewujudkan suatu kepentingan yang dapat dinikmati. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal.

Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) adalah sebuah mekanisme yang benar - benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Idealnya pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kampung melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrenbang. Ini biasa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme musrenbang, apalagi kenyataan yang ada hasil musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan faktor yang paling utama dalam proses pembangunan Kampung yang lebih baik. Perencanaan dapat menjadi sebuah faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan di Kampung, apabila tercipta suatu perencanaan yang baik dalam menentukan suatu program pembangunan yang tepat, maka pelaksanaan pembangunan sudah dapat dilaksanakan dengan baik pula. Berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan Kampung, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membuat suatu perencanaan kegiatan pembangunan apa yang akan dilakukan mengingat hanya masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai macam permasalahan dan potensi sumber daya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat setempat. Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif dalam perencanaan dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partisipatif ini kemungkinan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat/pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan

yang sesuai dengan kondisi Kampung serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan Kampung melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung Dukwia.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kampung Dukwia Arso VIII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang ada di Kampung seperti permasalahan di bidang Sumber daya alam yang ada di Kampung Dukwia yang cukup potensial untuk meningkatkan ekonomi desa dari sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sumber utama penghasilan masyarakat. Hasil produksi yang melimpah tidak diikuti dengan pembangunan pasar sebagai tempat untuk menjual hasil panen masyarakat. Dari segi Pendidikan di Kampung Dukwia masih belum optimal berkaitan dengan masih minimnya sarana dan pra sarana pendidikan yang ada seperti kondisi bangunan sekolah yang belum baik serta tidak ada sarana pendidikan tingkat SMP dan SMA atau yang sederajat. Begitu pun di bidang Kesehatan yang dimana lingkungan yang buruk dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta kurangnya tenaga medis dan tempat balai pengobatan membuat masyarakat sulit untuk melaksanakan pengobatan secara medis. Bidang Pemberdayaan perempuan. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di Kampung Dukwia untuk setara dan mendapatkan keadilan sosial dalam proses pembangunan masih rendah.

Dari berbagai masalah mengenai pembangunan yang dialami masyarakat di Kampung Dukwia karena proses pembuatan dan pelaksanaan pembangunan tidak didukung oleh hubungan kerja sama dan kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini dipengaruhi oleh kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan Kampung, minimnya kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan usulan atau pendapat dalam forum - forum rapat seperti musrembang di Kampung, dan pemerintah masih kurang optimal dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di sisi lain masyarakat juga harus sadar dan memahami akan pentingnya bekerja sama dan membantu serta mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Proses pembangunan akan berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari lapisan tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh-tokoh pemuda serta dari lapisan aparat pemerintahan yang ada di desa berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik demi mencapai suatu tujuan bersama. Masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan, pemerintah juga memegang peranan penting dalam pembangunan, di negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah lebih penting lagi terutama karena kebanyakan masyarakat masih harus dibangun prakarsa dan kemampuannya untuk terlibat secara efektif dalam pembangunan.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang masih rendah, sistem politik yang belum cukup membangun dan memberi ruang cukup bagi penyaluran kemampuan masyarakat adalah beberapa alasan masih lemahnya posisi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu pemerintah dianggap memiliki sejumlah kemampuan seperti pengetahuan/keahlian, kekuasaan, dana, teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu dengan kemampuan yang dimilikinya, pemerintah diharapkan mampu mengambil peran besar dalam pembangunan, termasuk dalam menggerakkan dan memberikan ruang bagi partisipasi dan perkembangan masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan peran pemerintah Kampung Dukwia Arso VIII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dalam melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung Dukwia Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (common goals), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan mereka. Partisipasi masyarakat menurut adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. (Isbandi,2007:27). Adanya partisipasi masyarakat yang baik dalam pelaksanaan musrembang desa maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbang dapat diterima semua pihak. (Rustian Kamaluddin,1992:184).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa "tidak memiliki" dan "acuh tak acuh" terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat setempat yang lebih mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk

menentukan arah kebijakan, berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

METODE

Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/ desain penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah subjek dan karakteristik subjek disertai data demografi (Azwar, 2007). Pada penelitian kuantitatif, jika penelitian menggunakan alat ukur tertentu, perlu disampaikan nama alat ukur, jumlah aitem, koefisien reliabilitas, serta metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, dijelaskan perspektif kualitatif yang digunakan, hingga metode pengambilan data dan analisisnya (Willig, 2008). Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan. Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Peneliti akan berhenti meneliti jika peneliti telah sampai pada tahap kejenuhan dimana data penelitian berulang dari sejumlah informan. Peneliti akan mencari tahu dan mengaitkan data dari peneliti lain yang sebelumnya telah meneliti dengan judul dan lokasi yang sama. Tahapan analisis data terdiri dari :

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir data dilakukan. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya minimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan memasukkannya kedalam bab pembahasan pada penulisan hasil penelitian.

b. Tahap Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk dapat mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lainnya berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisa data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi dengan cara kategorisasi. Sajian data yang baik dan jelas sistematiknya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar atau sketsa dan tabel. Kemampuan itu dirancang guna merakit secara teratur supaya mudah dilihat dan mengerti dalam bentuk yang baik.

c. Tahap Verifikasi Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data penelitian sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai dilakukan pencatatan pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi, alur penyebab akibat dan berbagai proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik diharapkan dapat meningkatkan peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, salah satu proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kampung yaitu adanya pelaksanaan musrembang Kampung. Musrembang Kampung merupakan salah satu wahana perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kampung/Kelurahan untuk mengenali masalah, potensi, kebutuhan, tantangan eksternal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

Musrenbang Kampung sebagai forum publik dalam rangka dialog dan pembahasan kegiatan perencanaan program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lain. Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat dalam musrembang Kampung sangat berpengaruh, semakin tinggi orang atau masyarakat yang menghadiri rapat, maka semakin besar pula peran serta partisipasi yang mereka lakukan. Berbagai bentuk partisipasi atau kontribusi yang diberikan masyarakat dalam proses rapat atau musyawarah rencana pembangunan Kampung, hal tersebut menunjukkan peran aktif serta keterlibatan masyarakat dalam rapat misalnya menyumbangkan berbagai ide-ide, sebuah gagasan, atau mengajukan usul, serta memberikan saran-saran dalam rapat desa, sehingga terjadi komunikasi melalui dialog antar masyarakat dengan perangkat desa yang memberikan tanggapan atau kritik terhadap masalah-masalah yang dibicarakan serta ikut memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut penting dilakukan oleh masyarakat karena dengan turut berpartisipasi dalam proses

perencanaan pembangunan, maka masyarakat dapat menentukan sendiri arah kebijakan program-program pembangunan yang akan dilakukan nantinya bersama dengan pemerintah setempat secara musyawarah dengan baik.

Terkait dengan strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kampung maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat, ada dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan Kampung yaitu : a). Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. b). Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penting dilakukan untuk mengetahui beragam masalah yang ada di Kampung Dukwia Arso VIII. Dalam proses identifikasi masalah, masyarakat dapat menyampaikan masalah-masalah yang mereka temukan di Kampung tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah sangatlah dibutuhkan karena dapat terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah setempat sehingga pembangunan nantinya akan sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agus W. Reba selaku Kepala Kampung Dukwia Arso VIII

“Partisipasi Masyarakat terhadap Musrenbang Kampung, masyarakat sangat sadar bahwa betapa pentingnya Musrenbang Kampung itu untuk duduk berbicara musyawarah bersama supaya mengangkat apa yang menjadi potensi-potensi atau masalah-masalah yang dikampung untuk diangkat kemudian di programkan supaya masuk dalam kegiatan kampung. Kemudian kembali lagi ke Kepala Kampungnya, yaitu Kepala Kampung harus bisa menjadi panutan atau contoh ke tengah-tengah masyarakat dengan langsung mengajak masyarakat turut berpartisipasi agar masyarakat tidak malas dan dapat memberikan masukan sehingga langsung di bahas bersama-sama”. (A.R, 26/11/18)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat sadar pentingnya ikut berpartisipasi dalam proses Musrenbang. Hal ini juga tergantung dari Kepala Kampung sebagai contoh agar masyarakat semakin percaya bahwa ide-ide dan saran mereka akan ditampung kemudian dibahas bersama-sama. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Elias Tabuni sebagai Kepala Bamuskam di Kampung Dukwia

“Masyarakat sendiri memberikan usulan-usulan untuk membangun Kampung ini, dari masyarakat yang usulkan kemudian kami tetapkan dari bawah. Semua unsur terlibat dari Tokoh Agama, perempuan, masyarakat, adat, kemudian ada RT, RW, pihak puskesmas, sekolah semua dilibatkan. Apa yang menjadi keluhan dari masyarakat itu lah yang diangkat menjadi sebuah program nantinya. Pembangunan yang ada bukan atas dasar kemauan dari Kepala Kampung atau Bamuskam tetapi langsung merupakan masukan dari masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi, keterlibatan masyarakat disini sangatlah penting bagi pembangunan yang ada di Kampung Dukwia ”. (E.T, 26/11/18)

Selain mewawancarai Kepala Kampung dan Kepala Bamuskam, peneliti juga mewawancarai Bapak Hairul selaku masyarakat yang ada di Kampung Dukwia, menyatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat ikut dilibatkan dalam proses Musrenbang, semua unsur juga dilibatkan tetapi hanya perwakilan saja. Bahwa disetiap RT di wakili oleh Ketua RT sendiri beserta dengan anggotanya maksimal 2 orang. Dengan melibatkan kami, (masyarakat) kami dapat memberikan usulan-usulan atau ide-ide dari masalah yang kita hadapi untuk membuat suatu program yang nantinya untuk menuntaskan permasalahan yang ada di Kampung Dukwia ini”. (H, 26/11/18)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peneliti mewawancarai masyarakat yang ikut dilibatkan dalam forum Musrenbang. Serta peneliti juga mewawancarai beberapa orang yang tidak mengikuti forum tersebut dimana mereka merasa tidak pernah dilibatkan atau di undang dalam proses musyawarah sehingga mereka tidak bisa memberikan aspirasi atau masukan dari masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber proses Musrenbang memang tidak melibatkan semua masyarakat langsung yang ada di Kampung Dukwia tetapi hanya perwakilan disetiap RT serta Tokoh-tokoh yang ada di masyarakat.

b. Pengambilan Keputusan

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus W. Reba selaku kepala Kampung Dukwia Arso VIII

“proses pengambilan keputusan melibatkan masyarakat, agar bagaimana kita bersama-sama mengambil suatu keputusan. Jadi, keputusan itu bukan saja hanya dari Kepala Kampung tetapi saya kembalikan ke forum/musyawarah bersama mengambil keputusan untuk mengangkat program prioritas utama/RKPK tahun 2019. Semua usulan sudah tercover kemudian dari usulan itu yang kami hitung kembali yang paling utama,

pembangunan yang paling dibutuhkan sekali untuk masyarakat. Kemudian kami bahas kembali di forum sehingga keputusan itu ada ditangan masyarakat kembali. Yang jelas jangan sampai memberatkan masyarakat, mengabaikan masyarakat pada intinya keputusan yang dibuat mutlak untuk kepentingan masyarakat umum". (A. R, 26/11/18)

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Kampung Dukwia bahwa, dalam proses pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat karena program-program yang akan diusulkan nantinya dibuat untuk kepentingan masyarakat umum. Sehingga pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka, agar masyarakat merasa tidak terabaikan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Ilyas Tabuni selaku Kepala Bamuskan

"Biasanya kami merankingkan, dari usulan itu semua diajukan kemudian kami tampung setelah itu kami rembuk dengan masyarakat untuk membuat program yang benar-benar menjadi masalah pokok dari masyarakat kemudian kami putuskan bersama-sama". (I. T, 26/11/18)

Selain mewawancarai Kepala Kampung dan Ketua Bamuskam Kampung Dukwia, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat sekitar, dimana pernyataan beberapa masyarakat sangat kontradiktif diantaranya

"Prosesnya terlalu lama dan hanya berputar-putar, hal yang dibahas hanya berputat dan mengambang di satu program saja. Prosesnya dari pagi sampai sore, sehingga kami lebih memilih ke ladang untuk bekerja". (K, 26/11/18)

Sebagian masyarakat merasa proses dari Musrenbang ini terlalu berbelit-belit dan tidak ada hasil akhirnya. Sehingga sebagian masyarakat yang hadir pada saat itu memilih pulang dan bekerja ke ladang hal ini menjadi masalah karena walau masyarakat sudah dilibatkan tetapi masyarakat tidak mengetahui hasil dari rapat bersama tersebut.

"Kami pemuda di kampung ini merasa hampir tidak pernah berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, dikarenakan dalam forum hanya suara-suara yang lebih tua lah yang didengar. Sedangkan kami para pemuda merasa hampir tidak pernah didengar". (H.A, 26/11/18)

Dari hasil wawancara peneliti terhadap salah satu tokoh pemuda dapat diketahui bahwa mengapa para pemuda di Kampung Dukwia jarang terlibat dalam forum Musrenbang itu dikarenakan mereka merasa bahwa hanya suara-suara yang lebih tua yang didengar sedangkan suara dari para pemuda sendiri jarang didengar. Hal ini mengakibatkan kurangnya kontribusi dari para pemuda dari Kampung tersebut.

c. Proses Evaluasi

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Reba selaku Kepala Kampung Dukwia

"kita mengangkat program-program usulan dari masyarakat evaluasi yang kita bahas adalah program untuk tahun berikut kita dapat lihat program yang kita jalankan itu bermanfaat atau tidak untuk masyarakat, walaupun tidak bermanfaat kepada semua masyarakat otomatis kita hentikan karena tidak ada manfaat untuk masyarakat. Salah satunya jika ada yang mengusulkan suatu program tetapi ada kepentingan pribadi yang bersangkutan maka itu dalam proses evaluasi kita bahas bersama-sama dengan masyarakat apakah mereka mendapat manfaat, jika tidak kita sepakat untuk tidak melanjutkan program tersebut". (A. R, 26/11/18)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung Dukwia diatas, dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi dilakukan setelah mengangkat usulan-usulan dari masyarakat kemudian evaluasi dilakukan dalam forum Musrenbang untuk tahun berikut apakah pembangunan yang dilakukan memiliki manfaat untuk seluruh masyarakat Kampung Dukwia atau hanya ada kepentingan pribadi saja. Sehingga proses evaluasi juga dilakukan bersama-sama masyarakat agar dapat dibahas bersama mengenai pembangunan yang ada. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi Musrenbang juga sangat penting dilakukan agar ada komunikasi antara masyarakat dan pemerintah setempat apakah pembangunan yang dilakukan memiliki nilai guna untuk masyarakat, jika tidak maka pembangunan atau program tersebut sepakat untuk dihentikan.

2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang adalah hasil assesmen paling penting terhadap usulan program yang prioritas dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain:

- 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Musrembang Kampung adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di Kampung setempat dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan Musrembang Kampung melibatkan masyarakat mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrembang Kampung yang dilaksanakan. Ini bisa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Musrembang Kampung juga merupakan sebuah mekanisme yang benar – benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme musrembang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrembang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan Musrembang Kampung sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait Musrembang itu sendiri. Secara lebih terinci faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1). Adanya komitmen politik yang tinggi dari pemerintah desa dan alokasi anggaran pendapatan desa yang memadai untuk penyelenggaraan musrembang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrembang. 2). Penyelenggara musrembang harus lembaga pemerintah desa itu sendiri yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan. 3). Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrembang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas. 4). Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter Kampung; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.

a. Penyusunan Rencana Kerja (RKP Kampung)

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kampung Dukwia mengenai proses Penyusunan RKP Kampung Dukwia

“untuk penyusunan RPKP sendiri memang melibatkan masyarakat, karena setelah usulan dari masyarakat masuk melalui forum Musrenbang baru kita menentukan program prioritas utama untuk tahun depan. Maka dari itu, usulan-usulan dari bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur semua yang akan masuk kedalam program perenkingan yang paling utama yang tidak bisa untuk diabaikan dan mendesak untuk harus segera dikerjakan dan kemudian kita masukan dalam RKP Kampung lewat musyawarah dengan Bamuskam dan masyarakat”. (A.R, 26/11/18)

Kepala Kampung Dukwia menyatakan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung. Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung diikuti oleh Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan unsur masyarakat di Kampung Dukwia.

b. Penyusunan Dokumen Anggaran

Berikut hasil wawancara bersama Kepala Kampung Dukwia mengenai Penyusunan Dokumen APB Kampung Dukwia

“proses penyusunan APB Kampung itu, kembali ke RKP Kampung, jadi program yang sudah dituangkan dalam RKP Kampung, kegiatan-kegiatan tersebut yang nanti kita bersama-sama dengan Kepala Bamuskam melihat pagu kita dari tiga sumber dana yaitu DD, ADD, dan Prospek kemudian kita menetapkan APB Kampung termasuk dengan honor aparat Kampung, non aparat Kampung kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik itu semua tertuang dalam APB Kampung dan semua itu sudah tertera didepan Kantor Kampung berupa spanduk tentang perincian dana yang dikeluarkan agar masyarakat dapat mengetahui kemana dana itu mengalir”. (A.R, 26/11/18)

Hasil wawancara diatas merupakan pernyataan langsung dari Kepala Kampung Dukwia, dimana dalam proses penyusunan APB Kampung itu kembali kepada RKP Kampung dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat dari tiga sumber dana yang ada di Kampung Dukwia yaitu DD, ADD, dan Prospek. Semua anggaran yang digunakan untuk hasil pembangunan Kampung dibuat perincian agar masyarakat

mengetahui dengan jelas penganggaran Kampung. Hal ini dilakukan agar ada keterbukaan antara pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Bamuskam

“tergantung dari sumber dana karena Kampung kita memiliki tiga sumber dana, maka semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan harus jelas kepada masyarakat. Maka dari itu kita membuat perincian dan memasangnya besar-besaran didepan Kantor Kampung agar tidak ada rahasia dari pemerintah Kampung kepada masyarakat”. (E.T, 26/11/18)

B. Analisis/Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah kebijakan, berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat perkampungan pada umumnya percaya akan kinerja pemerintah dan akan terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan apabila sudah melihat bukti secara nyata adanya pembangunan di daerahnya yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Dengan adanya program pembangunan yang sudah ada, maka dengan sendirinya masyarakat akan percaya dengan pemerintah dan akan ikut bekerja sama dalam membangun daerahnya ke arah yang lebih baik lagi. Selain bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik yang diberikan oleh masyarakat, partisipasi secara buah pikiran juga sangat bermanfaat dengan memberikan ide atau sebuah gagasan dalam merumuskan suatu program-program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu forum yang ada dalam merumuskan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah forum Musrenbang.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam musrenbang mempunyai arti penting dalam proses pembangunan wilayahnya. Adanya partisipasi masyarakat yang baik dalam pelaksanaan musrenbang Kampung maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbang dapat diterima semua pihak. Partisipasi masyarakat di Kampung Dukwia dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Dalam proses identifikasi masalah, masyarakat dapat menyampaikan masalah-masalah yang mereka temukan di Kampung Dukwia. Partisipasi masyarakat Kampung Dukwia dalam proses pengidentifikasian masalah sangatlah dibutuhkan karena dapat terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah setempat sehingga pembangunan nantinya akan sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Namun, dari hasil pengamatan yang sebelumnya dilakukan, masih banyak masyarakat yang tidak mengambil andil dalam proses tersebut dikarenakan dalam forum musrenbang selain hanya sebatas perwakilan saja, masih banyak masyarakat yang merasa tidak pernah diikutsertakan disetiap tahun forum Musrenbang Kampung Dukwia tersebut dijalankan sehingga masyarakat merasa pembangunan yang ada tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kampung Dukwia. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan bagi masyarakat di Kampung Dukwia.

b. Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang juga melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui program apa yang dilaksanakan. Namun, pada kenyataannya menurut hasil dari wawancara kepada masyarakat di Kampung Dukwia, beberapa masyarakat yang mengikuti proses Musrenbang tersebut mengaku hampir tidak mengetahui hasil akhir atau keputusan yang diambil dari proses musyawarah tersebut. Masyarakat Kampung Dukwia mengaku proses tersebut terlalu memakan waktu dikarenakan perdebatan yang sangat lama dan tidak ada hasil akhirnya. Otomatis masyarakat memilih pulang dan melanjutkan pekerjaan mereka bertani dan berternak. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui keluaran atau hasil akhir dari proses Musrenbang. Selain itu partisipasi dari para pemuda-pemuda yang di Kampung Dukwia juga sangat kurang hal ini berdasarkan hasil wawancara langsung dari para pemuda di

Kampung Dukwia, mereka mengatakan alasan mengapa tidak ikut berpartisipasi karena merasa hanya suara-suara dari orang yang lebih tua yang didengar sedangkan suara-suara dari para pemuda sendiri jarang didengar. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi dari pemuda-pemuda sebagai penerus di Kampung Dukwia.

c. Evaluasi

Proses evaluasi penting dilakukan karena merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan seberapa jauh program sudah berjalan seperti yang sudah direncanakan atau yang sudah dibahas dalam forum Musrenbang Kampung. Kemudian proses evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan di Kampung Dukwia sesuai dengan tujuan dan sasaran dari perencanaan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung Dukwia, proses evaluasi dilakukan untuk melihat kembali program dari hasil Musrenbang tahun lalu yang sudah dijalankan apakah pembangunan yang dilakukan memiliki nilai guna untuk masyarakat atau hanya ada kepentingan pribadi. Jika sudah begitu pemerintah Kampung Dukwia dan masyarakat sepakat untuk menghentikan program tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat Kampung Dukwia dalam proses pengambilan keputusan dimana yang dibahas dalam proses evaluasi mengenai program yang sudah berjalan dan sudah memakan biaya. Jika ada koordinasi antara pemerintah kampung Dukwia dengan masyarakat yang lebih spesifik maka pembangunan yang dilakukan nantinya akan sesuai dengan yang masyarakat inginkan dan memiliki manfaat untuk masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan sia-sia dan tidak membuang-buang biaya untuk pembangunan yang tidak bermanfaat.

2. Musyawarah Rencana Pembangunan

Musrenbang Kampung adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan di laksanakan tentang bagaimana yang seharusnya di lakukan pemerintah Kampung serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan di laksanakan. Untuk itu, agar Musrenbang Kampung lebih bermakna serta kelanjutan pembangunan, kita berharap kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mensinkronkan kegiatan yang ada di unit kerjanya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD pemanfaatannya lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. Bila suatu perencanaan sudah disusun dengan rapi dan matang diyakini sistem penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah.

Jalur musrenbang yang dilaksanakan di Kampung dapat dikatakan sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan di Kampung. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan di jalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling lemah pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan. Masyarakat tidak banyak tahu seberapa besar peluang usulannya yang ditampung dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar persentase kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang berasal dari aspirasi musrenbang. Inilah problem utama partisipasi masyarakat yang dihadapi didalam proses kebijakan penentuan perencanaan pembangunan khususnya yang terjadi di Kampung. Berikut indikator dari Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Dukwia

a Penyusunan Rencana Kerja (RKP Kampung)

Pemerintah Kampung Dukwia menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran dari RPJM Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung Dukwia dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kampung Dukwia yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung Dukwia menyusun rancangan RKP Kampung dan daftar usulan RKP Kampung. RKP Kampung disusun oleh pemerintah Kampung Dukwia sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung. Kepala Kampung menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kampung, hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di rankingkan kemudian di tuang kedalam dokumen RKP Kampung Dukwia.

b Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB)

Setelah RKP Kampung Dukwia ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Kampung Dukwia. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Kampung Dukwia dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah Kampung yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kampung. Keterkaitan antara RKP dan APB dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan salah satu

prinsip dalam ilmu perencanaan pembangunan. Melalui prinsip ini diharapkan apa yang telah direncanakan benar-benar dapat dilaksanakan dalam praktik. Kepala Kampung Dukwia mengatakan dalam proses penyusunan APB Kampung itu kembali kepada RKP Kampung dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat dari tiga sumber dana yang ada di Kampung Dukwia yaitu DD, ADD, dan Prospek. Semua anggaran yang digunakan untuk hasil pembangunan Kampung dibuat perincian agar masyarakat mengetahui dengan jelas penganggaran dari Kampung Dukwia tersebut.

SIMPULAN

Partisipasi Masyarakat di Kampung Dukwia dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) masih bisa dikatakan kurang karena 1) ada sebagian masyarakat yang enggan terlibat karena lebih memilih untuk bekerja dibandingkan harus menunggu hasil putusan dalam diskusi bersama dalam kegiatan Musrenbang hal ini disebabkan karena proses yang terlalu lama dan hanya berbelit-belit dan tidak ada hasil akhirnya 2) kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang melahirkan sikap apatisisme para kaum muda di Kampung tersebut 3) masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberlangsungan proses Musrenbang di Kampung tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat kepada masyarakat. Adalah masyarakat harus menyadari pentingnya turut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik dalam pelaksanaan musrenbang Kampung maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbang dapat diterima semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Anne Ahira, Terminologi Kosa Kata, Jakarta: Aksara, 2012.

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bintoro, Tjokroadmidjoyo. Perencanaan Pembangunan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1976

Ndraha, Taliziduhu. Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Rustian Kamaluddin. Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1992

Miles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54, Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Tjokrowinoto, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, Jakarta: CV. Cipruy, 1993.